JADMENT: *Journal of Administration & Development*
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 719-726
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

STRATEGI REVITALISASI FASILITAS PARIWISATA: STUDI KASUS TANTANGAN PANTAI CAMPLONG DAN INOVASI PROGRAM DESA BERDAYA DI BRANTA PESISIR

Tourism Facility Revitalization Strategy: Challenges at Camplong Beach and Community Empowerment Program Innovation in Branta Pesisir

Ach. Iqbal Hasan Fawaid[I*]
Dwi Shinta Fajariya[I]
Ainaya Hurun Ien[I]
Moh. Rosadi[I]
Soehartono Aliyansyah[I]
Rina Nur Azizah[I]

[I]Universitas Madura, Pamekasan

[*]corresponding author:
achiqbalhasan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan pengelolaan fasilitas wisata di Pantai Camplong dan merumuskan arah pemberdayaan masyarakat di Branta Pesisir, Kabupaten Pamekasan, melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen laporan kuliah lapangan tahun 2026 dan telaah pustaka Indonesia. Analisis dilakukan melalui pengelompokan isu, perbandingan karakter kawasan, serta penyusunan alternatif strategi. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa Pantai Camplong memerlukan prioritas inventarisasi kondisi fasilitas, pembenahan kebersihan, dan kejelasan pembagian tanggung jawab pengelolaan. Branta Pesisir memiliki basis kegiatan perikanan dan usaha masyarakat, tetapi membutuhkan penguatan pengelolaan sampah serta dukungan pengembangan produk dan partisipasi warga. Penelitian menawarkan strategi bertahap berupa pemetaan masalah, musyawarah aktor, pelaksanaan program percontohan, dan pemantauan indikator sederhana. Temuan merupakan interpretasi atas dokumen terbatas, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai hasil evaluasi dampak maupun verifikasi kontrak pengelolaan. Kajian ini berkontribusi pada perumusan agenda tindak lanjut yang berbeda sesuai fungsi sosial-ekonomi kedua kawasan.

Kata Kunci:
Revitalisasi fasilitas
Tata kelola pariwisata
Pemberdayaan masyarakat
Kawasan pesisir
Madura

Keywords:
Facility revitalization
Tourism management
Community empowerment
Coastal areas
Madura

Abstract

This study identifies tourism facility management challenges at Camplong Beach and proposes community empowerment strategies for Branta Pesisir, Madura, using a collaborative governance perspective. It employs a descriptive qualitative approach based on a 2026 student fieldwork report and a review of Indonesian literature. The analysis groups key issues, compares the different functions of the two coastal areas, and develops possible strategies. The findings suggest that Camplong Beach requires facility assessment, improved sanitation, and clearer management responsibilities. Branta Pesisir requires stronger waste management, support for fisheries-based enterprises, and community participation. A phased framework is proposed, covering issue mapping, stakeholder discussions, pilot activities, and simple monitoring indicators. These findings are interpretations of limited documentary evidence rather than verified program outcomes. Further field verification is necessary before implementation. The study contributes an initial context-sensitive agenda for coastal management and community empowerment.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

Submite: 04-11-2026 *Accepted: 20-11-2026* *Published: 23-11-2026*

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir memiliki fungsi yang beragam, mulai dari ruang rekreasi, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Keragaman fungsi tersebut berimplikasi pada perbedaan kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Kawasan pesisir yang dikembangkan sebagai destinasi wisata membutuhkan fasilitas yang layak, aman, bersih, dan mudah diakses untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Sementara itu, kawasan pesisir yang menjadi pusat kegiatan produksi perikanan membutuhkan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pengembangan pariwisata, fasilitas, kelembagaan, dan kualitas pengelolaan merupakan komponen yang saling

berkaitan dalam membentuk pengalaman pengunjung (Sunaryo, 2013; Patadjenu et al., 2023; Wibowo et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan kawasan pesisir perlu mempertimbangkan karakteristik dan fungsi utama masing-masing wilayah agar strategi intervensi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pengguna kawasan.

Pantai Camplong merupakan salah satu kawasan rekreasi pesisir yang menjadi perhatian dalam laporan kuliah lapangan mahasiswa Universitas Madura tahun 2026. Dokumen tersebut memuat sejumlah catatan mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kurang terawat, keberadaan sampah di lingkungan pantai, serta kesan berkurangnya keramaian pengunjung. Temuan tersebut memberikan indikasi awal mengenai perlunya pembenahan pengelolaan kawasan, khususnya berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas, kebersihan lingkungan, dan peningkatan mutu layanan destinasi. Namun demikian, catatan mengenai berkurangnya jumlah pengunjung belum didukung oleh data statistik kunjungan maupun pengukuran secara terstandar. Dengan demikian, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi permasalahan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan mengenai tren penurunan kunjungan wisatawan.

Dalam konteks revitalisasi kawasan wisata, pembenahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan atau penggantian fasilitas fisik, tetapi juga mencakup perbaikan sistem pemeliharaan, kejelasan tanggung jawab pengelola, dan mekanisme pengawasan secara berkala. Revitalisasi dapat diarahkan melalui identifikasi kondisi fasilitas, penentuan skala prioritas perbaikan, penetapan pihak yang bertanggung jawab, serta penyusunan jadwal pemeliharaan. Pendekatan tersebut penting agar kegiatan revitalisasi didasarkan pada kebutuhan nyata dan tingkat urgensi permasalahan, bukan semata-mata berdasarkan keluhan yang paling terlihat. Hal ini sejalan dengan pandangan Ningsih dan Yuza (2025) mengenai pentingnya pembenahan dalam pengelolaan kawasan serta pemikiran Sunaryo (2013) yang menekankan keterpaduan berbagai komponen dalam pengembangan destinasi wisata.

Berbeda dengan Pantai Camplong, kawasan Branta Pesisir memiliki karakteristik yang lebih kuat sebagai kawasan aktivitas perikanan dan ekonomi masyarakat. Aktivitas nelayan, pelelangan ikan, serta keberadaan usaha kecil menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Berdasarkan catatan lapangan, salah satu persoalan yang teridentifikasi adalah penumpukan sampah di sejumlah area. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kenyamanan permukiman, kualitas lingkungan kerja, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembersihan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan dalam pengelolaan kawasan pesisir karena menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pelaku yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan kebutuhan, mengelola sumber daya, dan mengevaluasi hasil kegiatan. Keterlibatan nelayan, pelaku usaha kecil, dan kelompok masyarakat lokal diperlukan karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan serta dinamika aktivitas ekonomi sehari-hari. Prayogi dan Sari (2019) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengembangan kawasan pesisir. Sejalan dengan itu, pendekatan pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengelolaan sampah berbasis kelompok, penguatan keterampilan pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan promosi produk lokal. Namun, bentuk kegiatan tersebut perlu disesuaikan

dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat serta kapasitas kelembagaan yang tersedia (Yonanda et al., 2025).

Perbedaan karakteristik Pantai Camplong dan Branta Pesisir menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir tidak dapat menggunakan pendekatan intervensi yang seragam. Pantai Camplong lebih membutuhkan strategi yang berorientasi pada revitalisasi fasilitas, peningkatan mutu layanan, dan penguatan pengelolaan destinasi wisata. Sebaliknya, Branta Pesisir membutuhkan strategi yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan pemberdayaan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan pesisir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kesesuaian strategi dengan fungsi kawasan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Dalam perspektif administrasi publik, perbedaan kebutuhan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pengelola kawasan, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha dalam merumuskan keputusan, membagi tanggung jawab, mengelola sumber daya, serta mengevaluasi pelaksanaan program. Secara operasional, tata kelola kolaboratif dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu kejelasan pembagian peran antarpemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, serta keterukuran mekanisme tindak lanjut dan evaluasi program (Silayar et al., 2021; Susu et al., 2024; Rochmatin et al., 2025). Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kawasan.

Meskipun kajian mengenai pengembangan kawasan pesisir, revitalisasi destinasi wisata, dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dibahas, diperlukan pendekatan analisis yang mampu membandingkan kebutuhan intervensi pada kawasan pesisir dengan fungsi yang berbeda. Persoalan mendasar yang perlu diperhatikan bukan hanya jenis permasalahan yang ditemukan, tetapi juga bagaimana karakteristik kawasan memengaruhi penentuan prioritas, pembagian peran, dan indikator keberhasilan program. Dalam konteks ini, kajian terhadap Pantai Camplong dan Branta Pesisir menjadi relevan untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan kebutuhan pengelolaan kawasan pesisir sekaligus merumuskan strategi awal yang proporsional berdasarkan bukti empiris yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan prioritas pada masing-masing lokasi, menganalisis perbedaan karakteristik kawasan dalam menentukan pilihan strategi pengelolaan, serta merumuskan indikator yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan strategi awal. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi pengelolaan kawasan pesisir yang membedakan kebutuhan revitalisasi dan peningkatan mutu layanan destinasi wisata di Pantai Camplong dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan di Branta Pesisir. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perspektif administrasi publik, khususnya dalam perumusan strategi pengelolaan kawasan pesisir berbasis karakteristik wilayah, partisipasi masyarakat, dan tata kelola kolaboratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian dokumen. Pilihan ini sesuai dengan tujuan memahami persoalan dan menyusun alternatif tindakan secara kontekstual, bukan menguji pengaruh variabel secara statistik. Prinsip analisis kualitatif mengutamakan penafsiran data dalam konteksnya dan keterbukaan terhadap keterbatasan sumber (Sugiyono, 2018).

Sumber utama adalah naskah laporan kuliah lapangan mahasiswa Universitas Madura tahun 2026 yang menjadi dasar penyusunan artikel awal. Dokumen mencatat pengamatan Pantai Camplong pada 5 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB serta identitas seorang informan pengelola. Namun, transkrip jawaban wawancara tidak tersedia dalam bahan yang dikaji. Informasi Branta Pesisir bersumber dari uraian laporan yang sama, sehingga kedalaman data antarlokasi tidak diasumsikan setara.

Sumber pendukung berupa buku dan artikel ilmiah Indonesia yang berkaitan dengan destinasi wisata, metode penelitian, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Literatur digunakan untuk membangun penjelasan konseptual, bukan untuk menggantikan bukti observasi setempat. Keterangan yang hanya tercantum dalam laporan dibedakan dari kesimpulan analitis dan usulan penulis.

Tahap analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, identifikasi pernyataan dalam dokumen yang berkaitan dengan fasilitas, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Kedua, pengelompokan informasi ke dalam tema utama masing-masing lokasi. Ketiga, perbandingan kebutuhan berdasarkan fungsi kawasan. Keempat, penyusunan matriks strategi yang memuat kegiatan, pelaksana yang perlu diajak bermusyawarah, dan indikator pemantauan.

Keabsahan hasil dijaga dengan tidak mengubah dugaan menjadi fakta terverifikasi. Misalnya, keterangan tentang pola kerja sama build–operate–transfer dan masa kontrak sampai 2030 hanya diperlakukan sebagai klaim dalam laporan yang perlu diperiksa melalui perjanjian resmi. Demikian pula, tidak disajikan jumlah pengunjung, volume sampah, pendapatan warga, atau kutipan wawancara yang tidak terdapat dalam sumber.

Keterbatasan penelitian meliputi tidak tersedianya transkrip lengkap, dokumentasi pengukuran kondisi fasilitas, data longitudinal, dan dokumen administratif pengelolaan. Oleh karena itu, hasil penelitian bersifat diagnosis awal dan rancangan tindak lanjut, bukan evaluasi keberhasilan intervensi yang telah dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi persoalan Pantai Camplong

Dokumen lapangan mengarahkan perhatian pada tiga persoalan, yaitu kondisi fasilitas yang dianggap kurang terawat, kebersihan area pesisir, dan kesan menurunnya keramaian. Ketiganya saling berkaitan secara masuk akal, tetapi hubungan sebab-akibat belum dapat dibuktikan. Sebagai contoh, fasilitas yang kurang nyaman mungkin memengaruhi pengalaman pengunjung, namun diperlukan survei dan data kunjungan untuk menguji dugaan tersebut.

Masalah fasilitas sebaiknya ditelusuri melalui daftar periksa yang mencakup toilet, tempat sampah, tempat istirahat, akses masuk, penunjuk arah, serta informasi layanan dan harga. Setiap item perlu diklasifikasikan menjadi berfungsi, membutuhkan perawatan, atau membutuhkan perbaikan mendesak. Klasifikasi tersebut memberi dasar yang lebih objektif bagi pengelola dalam menentukan urutan pekerjaan.

Kebersihan kawasan tidak cukup ditangani melalui kegiatan bersih-bersih sesekali. Diperlukan penempatan sarana pembuangan yang mudah dijangkau, pembagian jadwal petugas, dan evaluasi titik penumpukan. Selain itu, kanal pengaduan yang sederhana dapat membantu mengumpulkan keluhan pengunjung untuk ditindaklanjuti. Upaya ini mendukung gagasan bahwa pengembangan destinasi membutuhkan koordinasi layanan yang menyeluruh (Sunaryo, 2013). (Ningsih & Yuza, 2025)

Aspek kelembagaan menjadi perhatian karena dokumen awal menyinggung kerja sama pengelolaan. Sebelum menilai pihak tertentu lalai, perlu diperiksa dasar kewenangan, tanggung jawab pemeliharaan, mekanisme pembiayaan, serta kewajiban pelaporan. Penegasan ini

penting agar rekomendasi tidak mengandung penilaian hukum yang melampaui data yang tersedia.

Arah revitalisasi Pantai Camplong

Langkah jangka pendek adalah membentuk forum koordinasi kecil untuk menyepakati audit kondisi dan tindakan yang paling mendesak. Tahap berikutnya berupa perbaikan fasilitas dasar berdasarkan tingkat risiko dan manfaat bagi pengunjung. Dalam jangka menengah, pengelola perlu menerapkan jadwal inspeksi, pencatatan kerusakan, dan publikasi informasi layanan yang mudah dibaca. (Wibowo et al., 2022)

Keberhasilan awal tidak harus diukur dengan kenaikan jumlah wisatawan yang belum memiliki data pembanding. Indikator yang lebih realistis adalah proporsi fasilitas yang berfungsi, jumlah titik sampah yang ditangani, kepatuhan pada jadwal pembersihan, dan waktu tindak lanjut keluhan. Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi lanjutan.

Kondisi dan potensi Branta Pesisir

Branta Pesisir berbeda dari Pantai Camplong karena aktivitas utama yang dicatat dalam dokumen mencakup kegiatan nelayan, tempat pelelangan ikan, dan usaha masyarakat. Dengan demikian, lingkungan pesisir di sini tidak hanya dilihat sebagai lanskap yang dikunjungi, tetapi juga sebagai ruang produksi dan kehidupan sehari-hari.

Penumpukan sampah pada sejumlah bagian pesisir merupakan persoalan yang disebut dalam dokumen. Akan tetapi, sumber, jenis, volume, dan pola pergerakan sampah belum diukur. Program pengelolaan lingkungan karena itu perlu dimulai dengan pemetaan titik masalah dan penelusuran alur penanganan sampah yang berlaku, bukan langsung menetapkan satu solusi teknis untuk seluruh kawasan. (Yonanda et al., 2025)

Keberadaan kegiatan perikanan memberi peluang bagi penguatan nilai tambah produk lokal. Alternatif yang dapat dibahas dengan warga meliputi peningkatan kebersihan proses produksi, kemasan produk olahan ikan, pencatatan usaha sederhana, dan pemasaran berbasis jaringan lokal. Usulan ini selaras dengan penekanan pemberdayaan nelayan dalam pengembangan kawasan pesisir (Prayogi & Sari, 2019), tetapi belum merupakan bukti bahwa program tersebut telah berjalan di Branta Pesisir.

Pendekatan berbasis kelompok perlu memperhatikan pembagian waktu kerja nelayan, kemampuan pelaku usaha, dan keterwakilan warga. Kegiatan yang menambah beban tanpa manfaat yang dipahami masyarakat berisiko sulit berlanjut. Karena itu, musyawarah awal harus menentukan kebutuhan prioritas, pembagian kontribusi, dan manfaat yang diharapkan secara terbuka.

Rancangan program desa berdaya

Kajian Azizah, Luaylik, dan Rahmawati (2026) mengenai perempuan pesisir di Kepulauan Mandangin memperlihatkan pentingnya akses keterampilan, literasi keuangan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kerja sama pemerintah, pendamping, dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi. Temuan tersebut dapat menjadi pembanding konseptual bagi rancangan program di Branta Pesisir, khususnya agar pengelolaan lingkungan tidak dipisahkan dari penguatan usaha dan keterlibatan perempuan. Namun, karena penelitian tersebut dilakukan di Mandangin, temuannya tidak dapat dianggap sebagai bukti empiris tentang kondisi maupun keberhasilan program di Branta Pesisir.

Rancangan program dibagi menjadi tiga komponen yang saling mendukung. Komponen lingkungan mencakup pemetaan titik sampah, kesepakatan jadwal pembersihan, serta percobaan pemilahan sesuai kemampuan sarana setempat. Komponen ekonomi meliputi pendampingan mutu dan pemasaran produk olahan ikan. Komponen kelembagaan berupa

pembentukan forum pemantauan yang melibatkan perwakilan nelayan, pedagang, warga, dan pemerintah desa. (Teguh & Scott, 2026)

Pada tahap awal, satu kegiatan percontohan dapat dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dan sumber daya yang tersedia. Pemilihan percontohan membantu menguji kesesuaian kegiatan sebelum diperluas. Evaluasi sederhana dapat mencatat keterlibatan warga, frekuensi kegiatan, kendala operasional, dan keberlanjutan setelah pendampingan awal berakhir.

Kata inovasi dalam artikel ini menunjuk pada rancangan integrasi antara pengelolaan lingkungan dan penguatan usaha, bukan klaim penemuan program baru yang telah teruji. Penegasan tersebut diperlukan agar batas antara hasil pengamatan dan rekomendasi tetap jelas.

Analisis Perbandingan dan Prioritas Strategi

Perbandingan kedua lokasi memperlihatkan bahwa karakter penggunaan ruang merupakan dasar penentuan prioritas. Pantai Camplong berorientasi pada pelayanan rekreasi, sedangkan Branta Pesisir berorientasi pada aktivitas ekonomi dan permukiman. Oleh sebab itu, indikator, aktor, dan urutan tindakan perlu dibedakan. (Krispian et al., 2025)

Dari sudut administrasi publik, perbaikan layanan memerlukan penanggung jawab yang jelas. Ketidakjelasan pembagian tugas dapat menghambat penanganan masalah meskipun kebutuhan teknis telah diketahui. Pada Pantai Camplong, penentuan otoritas pemeliharaan menjadi prasyarat sebelum menyusun anggaran atau menilai kinerja pengelola. Pada Branta Pesisir, legitimasi kegiatan lebih banyak bergantung pada keterlibatan warga yang menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. (Silayar et al., 2021)

Kedua lokasi juga membutuhkan sistem pemantauan yang sederhana dan terbuka. Data awal dapat dihimpun melalui lembar inspeksi, dokumentasi berkala, dan catatan pertemuan. Informasi tersebut kemudian dibahas bersama para pihak untuk menentukan apakah strategi perlu dipertahankan, diubah, atau dihentikan. Pemantauan partisipatif lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran kelembagaan daripada sekadar menyelenggarakan kegiatan tanpa tindak lanjut. (Ariesmansyah & Arifin, 2026)

Perlu ditekankan bahwa rancangan ini tidak menyatakan seluruh aktor telah menyetujui program. Identifikasi pelaksana masih berupa daftar pihak yang sebaiknya dilibatkan. Pengambilan keputusan tetap membutuhkan verifikasi kewenangan, kesediaan warga, dan pembahasan sumber pembiayaan.

Rencana Implementasi dan Pemantauan

a. Tahapan pelaksanaan

Tahap persiapan dilakukan melalui pemeriksaan ulang informasi dasar. Untuk Pantai Camplong, pemeriksaan meliputi kondisi fasilitas dan dokumen pengelolaan. Untuk Branta Pesisir, pemeriksaan mencakup titik sampah, kelompok warga yang aktif, serta potensi usaha yang benar-benar membutuhkan pendampingan. Hasilnya dituangkan dalam catatan dasar yang disepakati.

Tahap perencanaan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penentuan prioritas. Setiap usulan perlu mempunyai tujuan, pelaksana, sumber daya, jadwal, dan indikator. Rencana tidak seharusnya menjanjikan capaian kuantitatif yang tidak didukung data dasar. (Yudiawantini & Afandi, 2026)

Tahap pelaksanaan dimulai dengan intervensi terbatas. Pada Camplong, prioritas dapat berupa perbaikan sarana yang paling mengganggu kenyamanan dan keselamatan. Pada Branta Pesisir, prioritas dapat berupa uji coba pengelolaan sampah di titik yang disepakati dan pelatihan usaha sesuai kebutuhan peserta. Setelah evaluasi awal, kegiatan yang layak dapat diperluas.

b. Indikator dan mekanisme evaluasi

Indikator proses di Camplong meliputi tersusunnya daftar kondisi fasilitas, terlaksananya pemeriksaan

berkala, dan adanya catatan penyelesaian keluhan. Indikator hasil awal berupa peningkatan jumlah sarana yang dinyatakan berfungsi berdasarkan inspeksi. Pengukuran kepuasan pengunjung dapat ditambahkan setelah tersedia instrumen dan jumlah responden yang memadai.

Di Branta Pesisir, indikator proses dapat berupa jumlah pertemuan kelompok, keberlangsungan jadwal kebersihan, dan keterlibatan pelaku usaha dalam pendampingan. Indikator hasil awal mencakup perubahan kondisi titik sampah yang terdokumentasi dan keberlanjutan praktik usaha yang disepakati. Perubahan pendapatan tidak boleh diklaim tanpa pencatatan yang memadai.

Dokumentasi sebaiknya memuat tanggal, lokasi, petugas pencatat, kondisi sebelum dan sesudah, serta tindak lanjut. Penilaian dilakukan bersama pihak terkait agar temuan tidak hanya menjadi laporan administratif. Sistem ini juga memudahkan perbaikan ketika muncul hambatan sumber daya atau koordinasi.

c. Risiko dan mitigasi

Risiko utama ialah keterbatasan dana, perbedaan kepentingan aktor, rendahnya kesinambungan kegiatan, dan ketidaklengkapan data. Mitigasinya berupa penetapan prioritas yang realistis, pembagian tugas tertulis, penjadwalan evaluasi, dan pengumpulan data secara bertahap. Kegiatan yang memerlukan biaya besar perlu menunggu perhitungan kelayakan dan keputusan pihak berwenang.

Dengan pendekatan bertahap, rekomendasi tidak bergantung pada asumsi bahwa seluruh masalah dapat diselesaikan sekaligus. Fokusnya adalah membangun kebiasaan mengidentifikasi masalah, melaksanakan tindakan, dan memeriksa hasil secara transparan.

KESIMPULAN

Kajian menunjukkan bahwa Pantai Camplong dan Branta Pesisir memerlukan strategi yang berbeda sesuai fungsi kawasannya. Pantai Camplong membutuhkan audit dan pemeliharaan fasilitas wisata, penataan kebersihan, serta klarifikasi tanggung jawab pengelolaan. Branta Pesisir membutuhkan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan penguatan potensi usaha berbasis perikanan. Kedua lokasi sama-sama memerlukan koordinasi, pembagian peran, dan pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi artikel ini terletak pada penyusunan kerangka strategi dan indikator awal berdasarkan perbandingan dua konteks pesisir. Akan tetapi, simpulan bersifat sementara karena laporan sumber belum menyediakan transkrip wawancara lengkap, pengukuran terstandar, data kunjungan, maupun dokumen resmi kerja sama. Oleh sebab itu, artikel tidak mengklaim adanya peningkatan layanan atau pendapatan sebagai dampak program.

Penelitian lanjutan disarankan melakukan wawancara dengan pengelola, pemerintah terkait, nelayan, pelaku usaha, dan pengunjung; melengkapi observasi dengan instrumen kondisi fasilitas dan kebersihan; serta memeriksa dokumen kelembagaan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memperkuat validitas rekomendasi sebelum digunakan sebagai dasar keputusan program.

REFERENSI

Azizah, R. N., Luaylik, N. F., & Rahmawati, D. A. (2026). Agensi ekonomi perempuan pesisir dalam menegosiasikan budaya Abhakalan dan patriarki: Studi transformasi relasi gender di Kepulauan Mandangin Madura. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(3), 676–686.

Ariesmansyah, A., & Arifin, R. K. (2026). Model collaborative governance dalam pengembangan desa wisata di Desa Patengan, Kabupaten Bandung. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 8(1).

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/59431

Krispian, F. E. P., Suardana, I. W., & Negara, I. M. K. (2025). Collaborative governance dalam menuju pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Jurnal IPTA, 13(1), 78–82. https://doi.org/10.24843/IPTA.2025.v13.i01.p10

Kuswandi, A., Lawelai, H., & Sadiyyah, Z. N. (2026). Policy network analysis and collaborative governance models in rural tourism development in Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(2). https://doi.org/10.26618/ojip.v16i2.21904

Ningsih, F., & Yuza, A. F. (2025). Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.25299/JMP.2025.20988

Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi. (2023). Tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 17(1), 23–48. https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48

Prayogi, P. A., & Sari, N. L. K. J. P. (2019). Pengembangan daerah pesisir dengan pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Badung. Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel, 3(1), 17–28. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1502614

Rochmatin, L., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2025). Collaborative governance dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Kertosari. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 16(2). https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.16741

Silayar, K., Sartika, I., & Mulyati, D. (2021). Tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Renaissance, 6(2), 859–874. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2090381

Sugiyono. (2018). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D. Alfabeta.

Sunaryo, B. (2013). Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.

Susu, M. T., Tokan, F. B., & Lamawuran, Y. D. (2024). Collaborative governance: Model kolaborasi tata kelola pariwisata bahari Meko di Desa Peldo Kabupaten Flores Timur. Jurnal Agregasi, 12(2), 175–191. https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i2.13285

Teguh, F. X., & Scott, N. (2026). Government-led DMO and collaborative governance practices: Case study in Labuan Bajo, Flores, Indonesia. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 20(1), 41–74. https://doi.org/10.47608/jki.v20i12026.41-74

Wibowo, B., Suherlan, H., Hidayah, N., & Nurrochman, M. (2022). Analisis tata kelola kolaboratif desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan: Investigasi empiris dari Ngargoretno-Magelang. Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan, 6(1). https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.646

Yonanda, H., Syamsir, S., Khalila, V. M., Fitri, H. A., Putri, M., & Fadhilah, A. (2025). Persepsi masyarakat pesisir terhadap program pengelolaan sampah plastik di Pantai Padang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(3), 30605–30613. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.32175

Yudiawantini, R., & Afandi, M. N. (2026). Pengembangan pariwisata berbasis collaborative governance di kawasan Waduk Jatigede. Jurnal Media Administrasi Terapan, 6(2). https://doi.org/10.31113/jmat.v6i2.125